

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, teknologi dan komunikasi semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang digunakan oleh para pimpinan organisasi untuk membentuk sebuah keputusan atau pengembangan solusi dalam peranan sistem informasi. Untuk menciptakan sebuah keberhasilan dalam suatu informasi tergantung pada tiga faktor yaitu : tata cara penggunaan, keserasian data dan mutu data pengorganisasian (Sadat 2019).

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara terselenggaranya kegiatan pemerintahan untuk menciptakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik (*good governance*). Dalam menciptakan *good governance* ini perlu memiliki sistem yang dapat mengakomodir dalam pelayanan sesuai kebutuhan yang efektif dan efisien. Dengan penggunaan internet yang semakin meluas, banyak sekali perubahan revolusioner yang berkembang. Perkembangan yang semakin pesat akan berdampak pada potensi pemanfaatannya juga. Dan memberikan peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat.

Dengan kemajuan sistem informasi memungkinkan mewujudkan pelayanan pemerintah yang baik termasuk dalam pengelolaan pegawai. Penerepan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut dengan *e-goverment* merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sistem informasi yang berbasis elektronik. Sehingga badan kepegawaian daerah (BKD)

Provinsi Jawa barat membuat salah satu inovasi yaitu Siap Jabar yang berfungsi untuk mengelola data pegawai secara mudah dan mengikuti arus teknologi zaman ini.

Siap Jabar merupakan aplikasi sistem informasi yang dibuat berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengatur sistem administrasi kepegawaian di lingkungan dinas pemerintahan daerah. Pembuatan aplikasi tersebut digunakan dengan sesuai kebutuhan untuk data-data pegawai terkini, namun dalam dua tahun terakhir aplikasi ini sudah digunakan di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat. Sehingga aplikasi tersebut memberikan manfaat bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di dinas pemerintahan serta juga menjadikan kebutuhan organisasi (Darmansyah, Handoko, and Tiyas Tinov 2020).

Aplikasi tersebut memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan data informasi secara tepat cepat dan akurat. Aplikasi siap Jabar ini tentunya telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 dimana terdiri dari: modul Data Induk Pegawai, modul Data Pelatihan, modul Promosi Jabatan, modul Tanda Jasa, modul Data Mutasi, modul Data Cuti, modul Data Hukuman, modul Laporan.

Awalnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa barat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan istilah SIMPEG, sebagai sistem informasi kepegawaian untuk dinas yang ada di jabar. Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan salah satu aplikasi yang dibuat sebelum adanya sistem informasi aparatur jawa barat (Siap Jabar) dan

sama-sama memiliki fungsi yaitu mengelola data pegawai dengan terdiri dari penyediaan informasi kepegawaian dan aturan aturan proses yang mengacu pada dasar-dasar peraturan kepegawaian (Zulkifli 2018).

Namun seiring berjalan nya waktu sistem yang terdahulu SIMPEG yang digunakan pada aplikasi terdahulu belumlah efektif sehingga dalam pengelolaan data sangat buruk dan tidak memuat kenyamanan bagi para pegawai. Berikut perbedaan tampilan dari aplikasi SIMPEG dan Siap Jabar.

Gambar 1. 1 Perbedaan tampilan aplikasi SIMPEG dan Siap Jabar.



Sumber : Tangkapan Layar (10 Maret 2023, 02:30 WIB)

Dilihat dari gambar 1.1, Seperti yang dapat dilihat antara SIMPEG dan Siap Jabar memiliki perbedaan yang cukup jauh dilihat dari segi sistem aplikasinya. Siap Jabar terlihat lebih simple dibandingkan dengan SIMPEG, dalam penggunaan layanan-nya pun Siap Jabar memiliki lebih banyak fungsi seperti : Update data, Rekon data akhir tahun, Migrasi data , dan layanan lainnya.

Kantor Dinas Sosial provinsi Jawa Barat telah menerapkan kebijakan sistem informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat yaitu dengan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar). Aplikasi

diperlukan sebagai pengembangan dan juga pengelolaan data pegawai untuk memenuhi tercapainya sebuah kebutuhan untuk organisasi. Siap Jabar tentunya mampu untuk membantu penyediaan data dan informasi sebagai bahan penentuan kebijaksanaan dan strategi pembangunan maupun bagi tersedianya data dan informasi operasional.

Dengan Siap Jabar dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna, dan berhasil serta menentukan arah kebijakan tentang mekanisme, koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Pengelolaan SIMPEG dikatakan cepat, tepat dan sesuai waktu apabila dalam prosedur kerja berjalan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu cepat pada saat pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data atau informasi kepegawaian, dan dikatakan tepat apabila dalam pengisian formulir tidak terdapat kesalahan sesuai format yang disediakan sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan menghasilkan data atau informasi yang benar dan tepat. Sedangkan sesuai waktu apabila ada permintaan data atau informasi kepegawaian baik dalam lingkup unit kerja maupun diluar unit kerja tersebut data atau informasi selalu tersedia dan siap sesuai kebutuhan dan waktu pemakaiannya.

Meskipun begitu, penerapan Siap Jabar masih banyak beberapa dinas yang mengalami terkendala dalam mengolah data pegawai khususnya di Dinas Sosial provinsi Jawa Barat yaitu masih ada pegawai negeri sipil yang belum memperbaharui data-data pribadinya di sistem informasi Siap Jabar. Dengan Keterlambatan memperbaharui data di Siap Jabar besar kemungkinan data pribadi pegawai masih dengan data lama, hal ini akan berimbas pada pegawai yang

kesulitan ketika ingin melakukan kenaikan jabatan, dan berpengaruh terhadap laporan data ke Badan Kepegawaian Daerah. Berikut Perbandingan jumlah data pegawai negeri sipil dan jumlah data pegawai yang belum memperbaharui di Siap Jabar per bulan Juni 2022.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Jawa Barat yang Data Pribadinya Belum Diperbaharui.

No	Unit kerja	Total PNS	Total Belum Update Siap Jabar
1	Dinas	122	56
2	UPTD	156	76
3	SATPEL	80	43
	TOTAL	358	184

Sumber : Dokumen Data di Aplikasi Siap Jabar Dinas Sosial Jawa Barat (10 Maret 2023, 02:45 WIB)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas bahwa data pegawai Dinas Sosial Jawa Barat yang belum diperbaharui sebanyak 184 orang dari 358 pegawai. Terkait dengan banyaknya jumlah data pegawai yang belum diperbaharui di aplikasi Siap Jabar, peneliti menemukan beberapa hal :

Pertama, para pegawai dinas sosial mengeluh banyaknya administrasi yang harus diisi dan dilakukan secara mandiri. seperti : Data personal, Riwayat jabatan, Riwayat pendidikan dan diklat (kursus), Riwayat SKP (dua tahun terakhir), Riwayat, Riwayat pangkat dan golongan ruang, Riwayat keluarga, Riwayat peninjauan masa kerja, Riwayat pindah instansi, Riwayat CLTN, Riwayat CPNS/PNS, Riwayat organisasi. Pegawai dinas sosial mengeluh dikarenakan masih penyesuaian dalam penggunaan teknologi baru, mengingat pegawai negeri sipil dinas sosial kebanyakan berumur diatas empat puluh tahun, Sehingga pegawai diatas empat puluh tahun sering meminta bantuan kepada pegawai yang lebih muda

untuk mengurus pengelolaan data-data pegawai dan menimbulkan permasalahan yang terjadi yang menghambat proses penerapan Siap Jabar. Adapun data pegawai negeri sipil dinas sosial jawa barat menurut kategori umur

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Jawa Barat Menurut Umur Tahun 2022.

No	Golongan Umur	Jumlah PNS
1	15-19	3
2	20-24	24
3	25-29	36
4	30-34	57
5	35-39	45
6	40-44	68
7	45-49	54
8	50-54	41
9	55-59	21
10	60+	9

Sumber : Dokumen Data di Aplikasi Siap Jabar Dinas Sosial Jawa Barat (12 Maret 2023, 02:45 WIB)

Dari tabel 1.2 Pegawai dengan umur diatas empat puluh tahun sering kali mengalami kesulitan ketika sedang mengupdate laporan data tahunan di sistem informasi aparatur jawa barat. Sehingga pegawai diatas empat puluh tahun sering meminta bantuan kepada pegawai yang lebih muda untuk mengurus pengelolaan data-data pegawai.

Kedua, yaitu permasalahan seperti memperbaharui data pegawai yang terlambat dilakukan, penginputan dalam pengumpulan pembaharuan data. Menurut pelaksana umum kepegawaian yang berada di Dinas Sosial provinsi Jawa Barat bahwa data-data kepegawaian tersebut merupakan salah satu syarat dan juga penginputan data di dalam sistem aplikasi Siap Jabar tersebut. para pegawai menganggap bahwa penginputan data pembaharuan itu tidak penting.

Pada aplikasi Siap Jabar diperlukan data-data terbaru dan lebih rinci agar dapat mempermudah pegawai jika menginginkan pengajuan naik jabatan atau mengajukan studi. Tentunya dengan keterlambatan tersebut dapat menghambat dalam proses pengelolaan data kepegawaian yang kemudian mengakibatkan tidak akuratnya data-data informasi kepegawaian yang ada di Dinas Sosial Jawa Barat. Data-data tersebut bersifat dinamis cepat berubah sehingga jika data tersebut tidak diperbaharui maka tidak akan dapat digunakan untuk keperluan mutasi atau kenaikan pangkat. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi pembaharuan untuk mencapai target program strategis dari BKD Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia tenaga ahli informasi teknologi yang memadai sehingga menjadi permasalahan yang menghambat proses Siap Jabar di Dinas Sosial Jawa Barat.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dibidang Informasi Teknologi Menurut Unit Kerja.

No	Unit kerja	Total PNS	Jumlah Pegawai dibidang IT
1	Dinas	122	2
2	UPTD	156	2
3	SATPEL	80	2
	TOTAL	358	6

Sumber : Dokumen Data di Aplikasi Siap Jabar Dinas Sosial Jawa Barat (12 Maret 2023, 12.30 WIB)

Dari tabel 1.3 bahwa dalam mengelola suatu sistem informasi aparatur diperlukan keahlian di bidang informasi dan teknologi, Siap Jabar masih sering mengalami gangguan keamanan informasi seperti human error, kerusakan software, kerusakan hardware, dan ancaman virus. Dan yang dapat mengatasi permasalahan

tersebut hanya pegawai dibidang informasi dan teknologi saja, selain itu harus di dukung oleh fasilitas yang memadai baik dari jaringan internet ataupun sarana dan prasarannya. Akan tetapi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat masih minim sumber daya yang ahli di bidang teknologi, Sehingga hal tersebut masih menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi aparatur jawa barat.

Keempat, Masih banyak para pegawai yang belum memahami cara penggunaan aplikasi Siap Jabar, sehingga mereka ini cenderung mengandalkan orang lain untuk melakukan penginputan data. Sehingga permasalahan mengenai kualitas pemahaman pengguna Siap Jabar di Dinas Sosial Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Pada penelitian sebelumnya, masih sebatas meneliti dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan aplikasi dahulu yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menyusun upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dinilai cukup rendah. Namun dalam penelitian tersebut belum menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai bagian dari perwujudan proses aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di instansi publik yang melaksanakan program tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang sistem aplikasi yang baru yaitu efektifitas penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar) sesuai dengan tujuan awal yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara Jawa Barat yang harus diterapkan di dinas-dinas Jawa Barat dan juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar), baik faktor pendukung maupun

faktor penghambat terbentuknya suatu Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar) yang efektif.

Manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi memerlukan perhatian agar pengelolaan data dan informasi kepegawian dapat diarsipkan dan diorganisir dengan baik. Penggunaan Siap Jabar sebagai sistem informasi kepegawaian di Dinas Sosial Jawa Barat akan membawa banyak manfaat, yakni mampu menghasilkan informasi dengan waktu yang relatif singkat. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dari latar belakang, maka penelitian tentang “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar) Dalam Pengelolaan Data Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa fokus masalah yaitu mengenai efektivitas dari penerapan sistem informasi aparatur dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan data pegawai yaitu :

1. Adanya tuntutan pengelolaan informasi pegawai secara cepat dan tepat.
Melihat banyak nya data yang perlu dimasukkan ke dalam Siap Jabar
2. Masih banyak Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat yang belum memperbaharui data-data pribadi di Siap Jabar. mereka menganggap bahwa penginputan data pembaharuan itu tidak begitu penting. Sehingga kurangnya kesadaran dari para pegawai negeri sipil yang seharusnya data-data mereka perlu pembaharuan.

3. masih perlunya penyesuaian dalam penggunaan aplikasi Siap Jabar bagi pegawai di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat.
4. Sering terjadi ketidak-akuratan dalam data informasi kepegawaian pada aplikasi Siap Jabar.
5. Minim sumber daya yang ahli di bidang teknologi yang mengelola aplikasi Siap Jabar

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar) dalam pengelolaan data Pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (Siap Jabar) yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Aparatur (Siap Jabar) dalam pengelolaan data pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Aparatur (Siap Jabar) yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan dapat memberikan kontribusi positif khususnya mengenai penerapan sistem informasi manajemen dan kepegawaian dalam pengelolaan data pegawai.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas Sosial Jawa Barat dalam pengelolaan data pegawai melalui aplikasi Siap Jabar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Banyak permasalahan saat ini yang muncul dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Bentuk permasalahan yang ada salah satunya dalam administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian merupakan segala kegiatan dalam organisasi yang berkaitan dengan manajemen. Kegiatannya dilakukan dengan mengelola dan menggunakan pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, hingga memberikan berbagai fungsi bagi perusahaan. Secara umum, perusahaan besar biasanya memiliki bagian administrasi (Andrew E. Sikula. 2011). Semua pejabat termasuk pegawai diperlukan penataan kepegawaian yang diantaranya melakukan pengelolaan data. Sisten Informasi Kepegawaian menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi dalam mengatasi masalah manajemen kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses kegiatan kepegawaian. Tiap instansi perusahaan memiliki suatu sistem untuk

mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan tentang sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai (Davis, B 1991). Sistem Informasi Kepegawaian memberikan manfaat oleh pemerintah daerah karena dapat mempermudah dalam sistem pengelolaan data kepegawaian dan juga memberikan informasi secara akurat dan juga untuk mendukung sistem administrasi pengelolaan kepegawaian khususnya di pemerintahan daerah.

Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah Siap Jabar, Peneliti masih melihat terdapat beberapa hambatan dalam Penerapan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Siap Jabar diantaranya yaitu: Pengumpulan data-data kepegawaian dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang cenderung tidak lekas datanya untuk diinput yang dapat mengakibatkan tidak reliabelnya informasi kepegawaian yang ada di Siap Jabar itu sendiri; Proses pengalihan arsip tercetak ke arsip digital yang rumit karena diharuskan menginput data kepegawaian secara rinci kedalam Siap Jabar dan juga harus selalu berhubungan dengan komputer dan jaringan internet. Sehingga perlu di lakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Maka peneliti menggunakan teori efektivitas dari (Steers 1985) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti tingkat efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga indikator yang saling berkaitan, yaitu : 1. Optimalisasi tujuan-tujuan 2. Perspektif sistem dan 3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Tabel 1. 4
Kerangka Pemikiran Penelitian.

